

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini perekonomian negara – negara di dunia sedang marak dengan sistem perdagangan bebas atau proses liberalisasi ekonomi. Proses liberalisasi ekonomi tersebut dimulai dengan terbentuknya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada 30 Oktober 1947. Saat, ini peran GATT digantikan oleh *World Trade Organization* (WTO) pada 1 Januari 1995 , karena GATT memerlukan upaya baru untuk memperkuat dan memperluas sistem multilateral. Perdagangan bebas bertujuan untuk dapat menghentikan atau setidaknya mengurangi hambatan pada perdagangan antar negara serta meningkatkan nilai perdagangan agar tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dunia juga semakin baik.

Konsep dari proses perdagangan bebas sendiri merupakan kebijakan perdagangan luar negeri yang tidak dibatasi oleh tarif atau subsidi pada impor atau ekspor dan tidak ada kuota atau pembatasan perdagangan lainnya. Kebijakan perdagangan bebas dapat diadopsi secara sepihak atau secara bilateral dengan bergabung dengan kawasan perdagangan bebas yang merupakan kelompok negara tanpa tariff atau pembatasan perdagangan lainnya di antara mereka, tetapi tetap bebas untuk mengontrol perdagangan mereka dengan non-anggota daerah. (Drozd & Miškinis, 2011)

Dengan kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi saat ini, tentu akan sangat memudahkan negara – negara dalam melakukan perdagangan internasional karena pergerakan barang dari suatu negara ke negara lainnya tidak dapat dihindari seiring

berkembangnya perdagangan internasional. Kerjasama dalam perdagangan internasional diharapkan dapat mengurangi hambatan – hambatan perdagangan seperti pembatasan kuota, pajak, larangan impor, *dumping* dan berbagai proteksi kebijakan ekonomi yang lainnya. Pada negara – negara dunia ketiga atau biasa disebut dengan *third world countries* yang mayoritas merupakan negara – negara berkembang, perdagangan bebas masih merupakan hal yang tabu. Perdagangan bebas memang dianggap memberikan dampak positif kepada negara berkembang karena perdagangan bebas menawarkan peluang untuk jumlah lapangan kerja yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui strategi yang diterapkan oleh perdagangan bebas. Namun, tidak sedikit pula yang menganggap bahwa perdagangan bebas memberikan dampak negatif pada negara berkembang karena perbandingan antara negara maju dan negara berkembang yang dirasa tidak adil karena memaksa negara berkembang untuk mengikuti arus perdagangan bebas yang sebenarnya lebih diungguli oleh negara maju. Hal ini akan menyebabkan produksi – produksi milik negara berkembang hancur dan sulit menyaingi produksi – produksi negara maju.

Meskipun banyak yang menentang dan mengkritik tentang perdagangan bebas, namun hal ini tidak dapat dihindari lagi karena globalisasi telah mendorong seluruh negara – negara di dunia untuk melakukan perdagangan internasional baik berupa barang maupun jasa. Hal ini dapat dilihat bahwa perjanjian – perjanjian mengenai perdagangan bebas dari yang bersifat regional maupun bilateral bertambah banyak karena keduanya merupakan pilihan terbaik kedua bagi FTA setelah perjanjian multilateral. Hal ini disebabkan karena implementasi dari perjanjian multilateral cukup sulit untuk sepenuhnya

diterapkan, banyak negara lebih memilih perjanjian bilateral dan regional untuk memperluas perdagangan dan memperkuat hubungan ekonominya dengan negara lain. (Widyasanti, 2011)

Perdagangan bebas juga dikembangkan oleh negara – negara ASEAN. *Assosiation of Southeast Asian Nations* (ASEAN), didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) oleh *Founding Fathers* ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada 7 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, dan Kamboja pada 30 April 1999, yang membentuk apa yang saat ini menjadi sepuluh negara anggota ASEAN. ASEAN sendiri bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemajuan sosial dan mengembangkan kebudayaan negara – negara anggota ASEAN serta mewujudkan dan meningkatkan perdamaian di tingkat regional Asia Tenggara. (Puja, 2012)

ASEAN memiliki banyak strategi untuk mewujudkan visi misinya, salah satunya adalah memperluas kerjasama ASEAN dengan negara – negara lain untuk membentuk AFTA (*Asean Free Trade Area*). AFTA adalah kesepakatan antara negara – negara ASEAN untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk – produk yang dihasilkan mampu bersaing kuat di pasar global. Selain itu, AFTA bertujuan untuk menarik FDI (*Foreign Direct Investment*) dan meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. AFTA dibentuk pada ASEAN *Summit* ke – 4 di Singapura tahun 1992 dan mulai beroperasi pada tahun 1993. (ASEAN, ASEAN Roundtable: 25 Years of ASEAN AFTA: The Way Ahead, 1992)

AFTA memiliki kesepakatan yang harapannya dapat dicapai dalam kurun waktu 15 tahun (1993 – 2008), namun dipercepat menjadi tahun 2003 dan dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Mekanisme yang digunakan oleh AFTA sebagai mekanisme utamanya adalah Skema CEPT-AFTA (*Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area*) yaitu : penurunan tarrif menjadi 0 – 5% penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan non tarrif lainnya.

Tercatat hingga saat ini ASEAN memiliki tujuh perjanjian perdagangan bebas yang telah dilakukan yaitu, *ASEAN Free Trade Area*; *ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area*; *ASEAN – India Regional Trade and Investment Area*; *ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership*; *Japan – Indonesia Economic Partnership Agreement* dan *ASEAN - China Comprehensive Economic Cooperation Agreement*; dan *ASEAN – Korea Free Trade Area*. Sementara itu ASEAN – *EU Free Trade Agreements* masih dalam proses negosiasi dan beberapa perjanjian lainnya sedang dalam tahap konsultasi dan studi lebih lanjut. (Widyasanti, 2011)

Penelitian ini berfokus kepada pengaruh kerjasama perdagangan bebas antara ASEAN –Korea Selatan terhadap perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan. Saat ini Korea Selatan adalah salah satu mitra perdagangan yang sangat populer bagi ASEAN. Kerjasama antara ASEAN dengan Korea Selatan diawali dengan sebuah inisiasi forum dialog yang diadakan oleh pemerintah dari Korea Selatan dan pemerintah negara – negara ASEAN yang berlanjut kepada pertemuan KTT ASEAN – Korea Selatan pada November tahun 2004. Selanjutnya para pemimpin Negara – Negara ASEAN dengan Korea Selatan menyepakati “ *Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership between ASEAN and Korea, esthtablising ASEAN – Korea Free Trade Area* ” pada

tanggal 13 Desember 2005 untuk menjadi landasan pembentukan ASEAN – Korea *Free Trade Framework Agreement* . Perjanjian perdagangan bebas ASEAN – Korea *Free Trade Area* resmi ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 24 Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia. (ASEAN - Korea *Free Trade Area*, 2012)

Perjanjian ini memiliki tujuan utama yaitu membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN – Korea Selatan (AKFTA) untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi antar negara khususnya anggota ASEAN dan Korea Selatan secara progresif untuk meliberalisasi dan mempromosikan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan rezim investasi yang transparan, liberal, dan fasilitatif. Perjanjian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi daerah – daerah baru dan mengembangkan langkah yang tepat untuk kerjasama dan integrasi ekonomi yang lebih erat, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari negara anggota ASEAN yang baru dan menjembatani kesenjangan pembangunan; dan, membentuk kerangka kerjasama untuk lebih memperkuat hubungan ekonomi di antara negara-negara anggotanya. (ASEAN Secretariat, 2013)

AKFTA merupakan salah satu contoh dari upaya untuk memperkenalkan perdagangan bebas secara regional. Pada Mei 2006, pihak ASEAN dan Korea Selatan menandatangani perjanjian perdagangan bebas yang bertujuan untuk merealisasikan kawasan perdagangan bebas pada tahun 2016. Namun kunci dari integrasi ekonomi regional adalah bahwa ekonomi komponen suatu wilayah atau blok perdagangan setuju untuk melakukan penghapusan penghalang progresif terhadap pergerakan bebas layanan barang, modal, dan tenaga kerja. Dalam konteks AKFTA, integrasi ekonomi pada saat ini umumnya

mengacu pada perluasan perdagangan antara ASEAN dan Korea Selatan. Menghapus semua hambatan untuk pergerakan barang dan jasa, modal dan tenaga kerja antara Korea Selatan dan sepuluh negara ASEAN adalah keputusan terbaik untuk tujuan jangka panjang. Pada tahun 2006 hingga 2007, ASEAN dan Korea Selatan menandatangani perjanjian perdagangan bebas barang dan jasa, termasuk kesepakatan penyelesaian sengketa dan pada Juni 2009, kedua belah pihak menyelesaikan Perjanjian Kerangka Kerja tentang Kerjasama Ekonomi Komprehensif dengan penandatanganan Perjanjian Investasi ASEAN-Korea Selatan. (Donghyun Park, 2012)

Penulis menganggap bahwa merupakan suatu langkah yang penting bagi ASEAN untuk menjalin kerjasama dengan Korea Selatan karena Korea Selatan menduduki peringkat sebagai mitra dagang terbesar kelima ASEAN setelah Tiongkok, Jepang, Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat. Sementara itu, ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar kedua Korea Selatan setelah Tiongkok, bahkan melampaui Amerika Serikat dan Uni Eropa. Volume perdagangan antara ASEAN dengan Korea Selatan juga selalu meningkat sejak tahun 2009, mengalami penurunan pada tahun 2015 hingga 2016, namun meningkat drastis pada tahun 2017. (ASEAN Secretariat, 2017)

Sebelum diadakannya perjanjian ini, ASEAN telah memiliki hubungan bilateral dengan Korea Selatan yang pada awalnya bertujuan untuk menjalin sebuah hubungan internasional antar negara yang dapat diajak untuk bekerjasama dalam berbagai faktor contohnya politik, keamanan negara, ekonomi dan yang lainnya. Namun, pemerintah Korea Selatan dan pemerintah negara – negara ASEAN menyetujui untuk membuat perjanjian perdagangan bebas yang tentu saja memberikan dampak

yang beragam pada hubungan bilateral dan multilateral Indonesia terutama dalam faktor perekonomian dan dampak dari perjanjian tersebut akan digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional seperti ekspor, meningkatkan kepercayaan investor negara lain terhadap Indonesia dan meningkatkan perdagangan antara Indonesia dengan Korea Selatan. (Rahmawati, 2017)

Korea Selatan sendiri telah menjadi salah satu negara *Newly Industrialized Countries* (NIC), atau negara yang dapat mengubah penghasilannya menjadi bergantung kepada sektor industri seperti manufaktur, pertambangan, konstruksi dan lain – lain. Hal ini menyebabkan negara NIC dapat meningkatkan nilai ekspor dan impornya terhadap negara lain dan negara tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Korea Selatan pada awalnya sendiri memiliki penghasilan terbesar dari sektor agrikultural. Korea Selatan mampu mengubah sektor agrikultural menjadi sektor yang terindustrialisasi sebagai sumber penghasilannya. (Wokutch, 2008)

Seiring berjalannya waktu penghasilan ekonomi Korea Selatan tidak hanya bergantung pada sektor agrikultural namun merambah sektor industri di bidang teknologi dan informasi seperti peralatan rumah tangga, elektronik, telepon genggam dan automotif. Bahkan saat ini banyak perusahaan besar milik Korea Selatan yang telah sukses memperluas pasarnya ke seluruh dunia seperti LG, Samsung, Hyundai dan Lotte. Selain itu Korea Selatan juga memiliki industri *entertainment*, pariwisata, kuliner dan budayanya kepada dunia internasional yang membuatnya menjadi negara memiliki daya tarik yang tinggi dan menjadi incaran negara - negara yang ingin membangun

berbagai kerjasama terutama dalam bidang ekonomi. (Naidu-Ghelani, 2012)

Tentunya keberhasilan Korea Selatan ini tidak lepas dari bantuan beberapa negara lain untuk memperluas pasar dan memenuhi kebutuhan produksi mereka terutama faktor tenaga kerja dan kebutuhan bahan baku yang tidak semuanya dapat terpenuhi oleh Korea Selatan. Selain itu, untuk tetap memenuhi kebutuhan sektor agrikulturnya, Korea Selatan bekerja sama dengan negara – negara yang memiliki keunggulan di bidang agrikultur seperti negara – negara ASEAN.

Disisi lain, pada era tahun 90-an, Indonesia pernah mengalami krisis moneter yang mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan terhambatnya hubungan perdagangan Indonesia dengan negara lain. Hal ini merupakan salah satu tantangan bagi Indonesia untuk segera mendapatkan kepercayaan pasar internasional pada sektor perdagangan bebas agar dapat memulihkan kembali keadaan ekonomi Indonesia saat itu. (Dr. Ranti Fauza Mayana, 2004)

Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN dan memiliki wilayah yang paling luas dan terbesar diantara negara – negara ASEAN yang lainnya dan terkenal dengan sumber daya alam serta sumber tenaga kerja yang melimpah. Hal ini menjadi kelebihan Indonesia dalam melakukan perjanjian kerjasama , terutama Korea Selatan. Kerjasama antar Korea Selatan dengan Indonesia dapat menjadi sebuah kerjasama yang menguntungkan karena saling memiliki kebutuhan yang sesuai seperti Korea Selatan membutuhkan sumber daya alam dan tenaga kerja yang sedangkan Indonesia dapat membangun sektor

industri menjadi lebih baik dengan bantuan mesin – mesin atau teknologi yang berasal dari Korea Selatan.

Begitu banyak perjanjian yang melibatkan Indonesia dengan segala keuntungan dan kerugiannya membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh ASEAN – Korea *Free Trade Area* (AKFTA) terhadap perdagangan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Sehingga penulis mengambil judul “PENGARUH KERJASAMA ASEAN – KOREA *FREE TRADE AREA* (AKFTA) TERHADAP PERDAGANGAN INDONESIA-KOREA SELATAN TAHUN 2005 – 2021 ”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh perjanjian AKFTA terhadap perdagangan Indonesia – Korea Selatan tahun 2005 – 2021 ?

1.3 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan suatu penelitian yang bersifat ilmiah, diperlukan seperangkat teori maupun konsep sebagai landasan dasar untuk memulainya. Sebuah teori dan konsep disini tentu harus relevan dengan penelitian yang dilakukan.

1.3.1 Integrasi Ekonomi Regional

Integrasi ekonomi merupakan definisi proses sebuah kelompok negara dalam upaya meningkatkan tingkat kemakmuran negaranya dengan cara membuat struktur ekonomi internasional yang lebih bebas dengan menghapuskan hambatan – hambatan perdagangan sesuai kesepakatan negara para anggotanya pada suatu kawasan tertentu, misalnya

ASEAN. Integrasi ekonomi dapat diuraikan menjadi beberapa bentuk yaitu (Salvatore, 1997) :

1. *Preferential Trade Arrangement*
Preferential Trade Arrangement atau peraturan perdagangan preferensial merupakan bentuk integrasi ekonomi yang dibentuk oleh negara - negara yang sepakat untuk menghapus hambatan perdagangan yang ada diantara mereka dan membedakannya dengan negara yang bukan anggota.
2. *Free Trade Area*
Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas merupakan bentuk integrasi ekonomi dimana perdagangan barang atau jasa dapat dilakukan antar negara anggota tanpa adanya hambatan tarif atau non - tarif sesuai dengan kesepakatan negara anggotanya.
3. *Custom Union*
Custom Union atau negara persekutuan pabean merupakan salah satu bentuk integrasi ekonomi yang mewajibkan semua negara anggotanya untuk menghilangkan hambatan perdagangan mereka, namun sekaligus menyamaratakan kebijakan perdagangan mereka dengan negara yang bukan anggotanya.
4. *Common Market*
Common Market atau pasar bersama merupakan salah satu bentuk integrasi ekonomi dimana perdagangan, arus faktor produksi dan tenaga kerja dibebaskan dari semua hambatan.
5. *Economic Union*
Economic Union atau uni ekonomi merupakan bentuk integrasi ekonomi yang menyeragamkan segala kebijakan fisikal dan moneter dari masing -

masing negara yang berada dalam satu kawasan atau bagi negara kelompok yang melakukan kesepakatan.

Integrasi ekonomi memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan efisiensi perusahaan dengan meminimalisir biaya produksi, meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Pembentukan integrasi ekonomi ini juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan bagi keseluruhan negara – negara anggotanya. (Lapipi, 2005). Salah satu contoh integrasi ekonomi adalah integrasi ekonomi di wilayah Asia Tenggara (ASEAN). Negara – negara yang tergabung dalam ASEAN telah melakukan pembahasan untuk menerapkan integrasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat negara anggota ASEAN yang berwujud *Free Trade Area* atau kawasan perdagangan bebas untuk wilayah Asia Pasifik.

Free Trade atau perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk memperluas kuantitas barang dan jasa yang dikonsumsi. Melalui impor, suatu negara dapat memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di rumah atau dapat diproduksi di rumah hanya dengan biaya yang lebih besar daripada biaya memperolehnya secara tidak langsung dengan menukarkannya dengan ekspor yang dihasilkannya. Dengan kata lain, melalui perdagangan, suatu negara dapat memperoleh barang dan jasa dengan efisiensi yang lebih besar dengan mengkhususkan diri dalam kegiatan-kegiatan di mana negara memiliki keunggulan komparatif. (David M. Gould, 1993)

Perdagangan bebas merupakan evolusi dari teori standar perdagangan internasional, kembali pada teori Adam Smith *Wealth of Nations* (1776) dan David

Ricardo *Principles of Economics* (1951). Kedua tokoh ini mengemukakan perumusan teori perdagangan bebas berdasarkan keberhasilan penerapan teori ini di Inggris dibidang industri dan perdagangan. Bagi Smith, adanya pembagian kerja dalam industri berskala besar mampu memberikan landasan untuk menurunkan biaya tenaga kerja agar persaingan antar negara berjalan efektif. Kemungkinan dilema dalam hal penyesuaian moneter bagi negara – negara yang memiliki surplus berkelanjutan dapat dikesampingkan dengan mengandalkan penyesuaian secara otomatis, dalam *price-specie flow mechanism* yang ditawarkan Adam Smith. (Sen, 2010)

David Ricardo meneruskan teori perdagangan bebas yang diprakarsai oleh Adam Smith dengan memilah landasan teori tersebut. Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo memiliki keberhasilan yang lebih unggul dibandingkan teori sebelumnya, keduanya berhasil di industri skala besar dan pasar internasional. Perdagangan bebas diartikan oleh David Ricardo sebagai aktivitas yang bersifat komersial yang dijalankan secara bebas dari perbatasan nasional yang membawa keuntungan bagi para pelakunya karena perdagangan bebas menyebabkan adanya spesialisasi yang meningkatkan efisiensi. Dengan demikian produktivitas dapat ditingkatkan lebih daripada sebelumnya. David Ricardo, seperti halnya dengan Adam Smith, tidak menyetujui adanya kebijakan pemerintah dalam pembatasan perdagangan. Menurutnya keunggulan yang komparatif dapat menciptakan keuntungan dimana negara yang akan memproduksi barang lebih murah dan efisien serta mengimpor barang dianggap membutuhkan dana yang lebih besar pada produksinya. (Sorensen, 2005)

Selain itu, sebuah wilayah perdagangan bebas dapat diartikan sebagai sekelompok negara dimana bea cukai dan pembatasan perdagangan lainnya dihapuskan pada perdagangan produk yang berasal di negara-negara anggota. Setiap negara akan berjanji untuk mengakui bebas bea dan pembatasan barang yang diproduksi di negara-negara peserta lainnya. (Schuller, 1949). Perdagangan bebas kemudian didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang mengarah ke penjualan produk antar negara tanpa adanya pajak ekspor maupun impor atau hambatan – hambatan perdagangan lainnya (Apridar, 2009). Perdagangan bebas juga berarti sebagai perdagangan terbuka atau antar negara berdasarkan komparatif, dimana negara diberikan kebebasan dalam melakukan perdagangan pada suatu komoditas tertentu yang akan menjadi spesialisasi negara sehingga lebih efektif dan efisien. Berikut merupakan manfaat bagi aktor perdagangan bebas yaitu :

1. Perdagangan yang menciptakan persaingan terbuka
2. Perdagangan yang menawarkan pilihan kepada konsumen sehingga konsumen mendapatkan banyak jenis varian untuk barang yang akan dibeli
3. Perdagangan terbuka dapat menghindari kurangnya barang – barang tertentu

Perdagangan bebas mampu menciptakan pasar terbuka dengan persaingan yang sehat antara pelakunya. Dengan terbukanya persaingan ini, tentunya dapat menciptakan pasar persaingan yang sempurna, dimana konsumen dan produsen sama diuntungkan dalam perdagangan karena tidak ada pihak yang memonopoli pasar. (O'Callaghan, 2002).

Sebuah negara dapat dianggap berhasil dalam melakukan pasar bebas adalah ketika sebuah negara tersebut berhasil membebaskan *tax* atau *barriers* dalam

perdagangan internasional terhadap negara yang menjadi partner perdagangan karena pembebasan *tax* atau *barriers* merupakan salah satu tujuan dari dilakukannya perdagangan bebas tersebut. Selain itu sebuah negara juga dianggap berhasil dalam pasar bebas jika memiliki daya saing ekspor dan kinerja perdagangan yang baik karena jika sebuah negara memiliki daya saing ekspor serta memiliki kinerja perdagangan yang baik maka negara tersebut dinilai dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas itu dengan baik. (Andari, 2017)

Dalam pengaplikasiannya, teori ini menekankan eksistensi ASEAN-Korean *Free Trade Area* melalui program-program yang ditawarkan sebagai fasilitas untuk memperluas kerjasama dan peningkatan ekonomi di Asia tenggara. Dari teori diatas dapat dijelaskan bahwa perdagangan internasional yang berbasis *free trade* memudahkan dua negara untuk menjalankan aktifitas perdagangan yang menguntungkan perekonomian antara dua negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Seperti yang telah paparkan oleh O'Callaghan, bahwa perdagangan bebas tersebut juga dapat menciptakan persaingan terbuka serta menawarkan banyak varian barang yang dapat dibeli dengan menghindari kurangnya suatu barang tertentu dan perdagangan bebas juga membebaskan *tax* dan *barriers* yang menguntungkan bagi pihak Indonesia maupun pihak Korea Selatan. Salah satunya seperti peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan setelah berlaku *preferential tariff* atau diperluasnya tingkat tarif terhadap negara – negara mitra yang telah menandatangani AKFTA dan meningkatnya nilai ekspor ini dapat memberi peluang besar terhadap Indonesia untuk memasuki pasar Korea Selatan untuk mempromosikan produk – produk hasil

produksi Indonesia seperti bahan – bahan baku ataupun sumber daya alam Indonesia yang dapat diolah atau diproduksi yang dibutuhkan oleh Korea Selatan.

1.4 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah serta kerangka teori yang telah dipaparkan, hipotesa yang dapat ditarik adalah : perjanjian AKFTA memberikan pengaruh – pengaruh positif terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan yaitu memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, meningkatnya nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan, dan peningkatan investasi Korea Selatan ke Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik dan cara kualitatif lainnya (Moleong, 2006). Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi atau telaah pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan menganalisa sejumlah literatur yang berhubungan dengan studi kasus yang diteliti. Data yang dikumpulkan dapat bersumber dari dokumen, buku – buku, surat kabar, internet, rekaman arsip wawancara, dan lain -lain. (Bungin, 2001)

1.6 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang berjudul Pengaruh Kerjasama ASEAN – Korea *Free Trade Area* (AKFTA) Terhadap Perdagangan Indonesia – Korea Selatan tahun 2005 - 2021 adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari ASEAN -

Korea *Free Trade Area* (AKFTA) terhadap perdagangan Indonesia – Korea Selatan baik sebelum dan sesudah kerjasama tersebut dilakukan.

1.7 Jangkauan Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh kerjasama ASEAN – Korea *Free Trade Area* (AKFTA) terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan, maka penulis akan membatasi data yang akan diambil yaitu tahun 2000, sebelum adanya kerjasama ASEAN – Korea *Free Trade Area* hingga setelah dilakukannya kerjasama ASEAN – Korea *Free Trade Area* pada tahun 2021. Data yang akan digunakan adalah sebagai pembandingan untuk melihat signifikansi pengaruh AKFTA terhadap hubungan perdagangan Indonesia – Korea Selatan.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, agar dapat menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah yang baik, maka penulis akan membagi elaborasi dalam beberapa bab. Setiap bab dari penelitian ini akan memiliki korelasi yang tidak dapat dipisahkan setiap babnya. Berikut adalah perumusan bab dalam penelitian kualitatif ini:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, akan membahas tentang hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan sebelum

adanya kerjasama ASEAN – Korea Selatan *Free Trade Area*.

Bab III, akan membahas tentang faktor – faktor pengaruh peningkatan perdagangan antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Bab IV, akan membahas dampak dari ASEAN – Korea Selatan *Free Trade Area* terhadap perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan.

Bab V, akan membahas kesimpulan atau penutup dari keseluruhan bab yang telah dibahas, berisi ringkasan tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.